

LEMBAR LAMPIRAN

**DRAFT WAWANCARA PERIHAL PENELITIAN SKRIPSI YANG BERJUDUL
“EFEKTIVITAS PROGRAM TAGANA DALAM PENANGANAN TANGGAP
DARURAT DI BANTUL TAHUN 2017”**

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh TAGANA berdasarkan tugas dan fungsi yang tertera pada sumber data primer yaitu dalam Renja dan sumber data sekunder yang tertera dalam SOP yaitu:
 - a. Bagaimana proses dalam menetapkan status tanggap darurat ?
 - b. Bagaimana menetapkan beberapa staf terkait dengan tugas dan kewenangannya ?
 - c. Bagaimana proses membuat program-program TAGANA terkait tanggap darurat ? Apa saja ?

2. Kejelasan strategi yang hendak dicapai oleh TAGANA berdasarkan tugas dan fungsi yang tertera pada sumber data primer yaitu dalam Renja dan sumber data sekunder yang tertera dalam SOP yaitu :

Bagaimana cara menetapkan tim pelaksana yakni kepala pos darurat kecamatan, sekretariat tanggap darurat, tim komunikasi, tim relawan medis dan psikososial, tim dapur umum dan tim tenda serta sarana ?

3. Perencanaan program yang hendak dicapai oleh TAGANA berdasarkan tugas dan fungsi yang tertera pada sumber data primer yaitu dalam Renja dan sumber data sekunder yang tertera dalam SOP yaitu :
 - a. Bagaimana prosedur untuk menetapkan program sesuai dengan penetapan status tanggap darurat setelah kejadian bencana ?
 - b. Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan evakuasi korban bencana alam ?
 - c. Bagaimana proses menjalankan program dapur umum serta menyediakan perlengkapan untuk dapur umum ?

d. Bagaimana proses mendirikan posko evakuasi korban bencana serta menyediakan perlengkapan posko dan kebutuhan bagi korban bencana ?

4. Pelaksanaan yang efektif dan efisien yang hendak dicapai oleh TAGANA berdasarkan tugas dan fungsi yang tertera pada sumber data primer yaitu dalam Renja dan sumber data sekunder yang tertera dalam SOP yaitu:

- a. Apa tolak ukur yang dinilai terhadap kinerja Komando lapangan (kodal) jika dikatakan efektif ?
- b. Apa tolak ukur yang dinilai terhadap kinerja kepala pos darurat kecamatan jika dikatakan efektif ?
- c. Apa tolak ukur yang dinilai terhadap kinerja tim komunikasi jika dikatakan efektif ?
- d. Apa tolak ukur yang dinilai terhadap kinerja tim relawan medis dan psikososial jika dikatakan efektif ?
- e. Apa tolak ukur yang dinilai terhadap kinerja tim dapur umum jika dikatakan efektif ?
- f. Apa tolak ukur yang dinilai terhadap kinerja tim tenda dan sarana jika dikatakan efektif ?

**DRAFT WAWANCARA PERIHAL PENELITIAN SKRIPSI YANG BERJUDUL
“EFEKTIVITAS PROGRAM TAGANA DALAM PENANGANAN TANGGAP
DARURAT DI BANTUL TAHUN 2017”**

Narasumber : Bapak Anwar (Warga Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan, Bantul)

Ibu Titin (Guru SD Petir Piyungan, Bantul)

- a. Apa itu TAGANA ?
- b. Apa tujuan dari dibentuknya TAGANA ?
- c. Adakah program nyata yang dilakukan TAGANA ?
- d. Bagaimana proses TAGANA dalam menjalankan programnya ?
- e. Apakah TAGANA sangat dibutuhkan ?
- f. Apakah TAGANA sudah efektif dalam menjalankan tugasnya

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
3. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel IV.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Meningkatnya kinerja	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing	penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemerintahan Daerah (EKPPD) Nilai Evaluasi Kinerja
3. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai
4. Meningkatkan pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel IV.2
Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Rantoul

Visi	Misi	Strategi	Kebijakan
<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan pelaksanaan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah</p>	<p>kinerja pemerintahan daerah perencanaan dan evaluasi kinerja</p>	<p>Se seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja)</p>
		<p>Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD</p>	
	<p>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan melalui bimtek dan sosialisasi</p>	
		<p>Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD secara berkala</p>	
		<p>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah</p>	<p>Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>
		<p>Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid</p>	
		<p>Meningkatkan tertib administrasi pertanahan</p>	<p>Tertib pensertifikatan tanah, workshop PPAT, penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan</p>

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur daerah dan peningkatan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi daerah	Penyusunan kajian-kajian yang mendukung pelaksanaan kerjasama dan potensi daerah, pengembangan BUKP dan KUKP, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi daerah
		Meningkatkan kelancaran tindak lanjut kerjasama	Meningkatkan penyusunan kebijakan yang mendukung investasi dan kerjasama daerah
		Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas	Peningkatan kapasitas penyusun rancangan produk hukum daerah dan optimalisasi sistem informasi hukum daerah
		Meningkatkan publiikasi produk hukum daerah melalui Sistem Informasi Hukum (SIMKUM)	
		Memberikan bantuan hukum kepada perangkat daerah dan pemerintah desa	Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum
Misi 2 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana			
Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah	Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
		Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala	Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur daerah dalam melaksanakan pemerintahan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Misi 3 : Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah			
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah	Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian serta instansi Pemerintahan lainnya	
Misi 4 : Meningkatkan pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik	Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik	


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANTUL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	13.25
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan perempuan dan anak	%	0.38

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.146.111.265,00	Anggaran APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.258.990.200,00	Anggaran APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.000.000,00	Anggaran APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	8.161.100,00	Anggaran APBD
5.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anal. dan Perempuan	385.251.500,00	Anggaran APBD
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.565.419.950,00	Anggaran APBD
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.254.715.000,00	Anggaran APBD
8	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	1.377.958.250,00	Anggaran APBD
9.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.802.085.000,00	Anggaran APBD
10.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	55.700.000,00	Anggaran APBD
11.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	481.895.000,00	Anggaran APBD
12	Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	144.785.000,00	Anggaran APBD
	Jumlah	9.545.072.265,00	

Bantul, Januari 2018

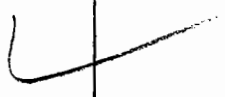
Pihak Kedua
Bupati


Drs. H. SUHARSONO

Pihak Pertama
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


Drs. EDDY SUSANTO

	Kepemudaan	
	Kegiatan :	
	Pembinaan Organisasi kepemudaan dan Peningkatan peran serta pemuda	211.385.000,00
5	Program : Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	
	Kegiatan :	
	a Pelaksanaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	239.465.000,00
	b Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Monumen	100.000.000,00
6	Program Pengembangan data /Informasi/statistik daerah	
	Kegiatan:	
	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	240.312.500,00
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	Kegiatan:	
	a Penyusunan data terpilah dan sistim informasi gender dan anak	10.000.000,00
	b Pelatihan Penigkatan Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak	40.000.000,00
8	Progrm Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda	
	Kegiatan :	
	Pengembangan potensi pemuda	230.000.000,00
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
	Kegiatan:	
	A Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	234.650.000,00
	b Forum Penanganan Kekerasan	35.000.000,00
	c Pemberdayaan Perempuan dan Anak	15.000.000,00
	d Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	27.000.000,00
	e Pelaksanaan kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	50.000.000,00
10.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
	Kegiatan :	
	a Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	388.215.000,00
	b Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	70.000.000,00
11.	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.	
	Kegiatan :	

			social masyarakat						
			Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial nasional	1300 orang	1300 orang	100			
			Fasilitasi pemantauan dan penyaluran bantuan bencana	100 %	100 %	100			
			Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya	200	63	31,5			
3	Rasio kekerasan perempuan dan anak	Rasio kekerasan perempuan dan anak	Pelaksanaan Kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)						
			Pemberdayaan Perempuan dan Anak						
			Forum Perlindungan Korban Kekerasan						
			Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul						
			Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan						
			Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender						

	PMKS						
		Penanganan PMKS melalui kegiatan :					
		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS		146 orang	146 orang	100	Sangat berhasil
		Pendampingan Anak Yatim Piatu	3200 anak	3500 anak	3200 anak	91	Sangat Berhasil
		Penangan <u>Jenazah</u> <u>terlantar</u>	30 orang	40	20	50	Sangat Berhasil
		Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Lansia		9 kegiatan	9 kegiatan	100	Sangat berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = $(4 \times 92,5) / 4 = 92,5$

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1.2 sebesar = 92,5

Dari tabel III.7 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.2 : terdiri dari 4 kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran tersebut dicapai melalui program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 4 kegiatan sebagai berikut :

Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Kegiatan : Fasilitasi Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana.

Tabel III.11 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.6 tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai capaian (%)	Kategori
	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS					
		Penanganan melalui Kegiatan :					
		Fasilitasi pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	90 KK	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = $(1 \times 92,5) / 1 = 92,5$

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 sebesar = 92,5

Dari tabel III.11 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.6 terdiri dari satu kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Fasilitasi Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana. Korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS, yang merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Pemberian bantuan kepada korban bencana berupa beras, minyak, saos, kecap, sarden, matras dll. Kegiatan ini adalah untuk mengampu penyaluran bantuan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Ditargetkan 100 % dari total korban bencana yang terjadi di

	dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan				Agama
12	Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh	196,740,000	195,660,000	99.45	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
13	Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Monumen	22,000,000	22,000,000	100	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
14	Pemberdayaan Kaum Rois dan Penjaga Masjid	800,212,500	766,470,000	95.78	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
15	Pelatihan Manajemen Pengelola Tempat Ibadah	72,852,500	72,427,500	99.42	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
14	Pendampingan Program Nasional Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat dan JSLU	104,169,000	104,144,000	99.98	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
15	Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya	45,398,700	44,498,700	98.02	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
16	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	71,150,000	66,812,500	93.90	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
17	Peningktn. Kualitas SDM Lembaga Sosial	408,845,000	406,025,000	99.31	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
18	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	68,740,000	68,740,000	100.00	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
19	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	3,251,000	2,910,500	89.53	Sekretariat
20	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	3,251,000	2,500,200	76.91	Sekretariat
21	Fasilitasi, Pemantauan dan Penyaluran Bencana	76,720,000	73,936,125	96.37	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
22	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	539,249,450	510,136,957	94.60	Sekretariat
	Jumlah	7,988,546,100	7,576,149,741	94.84	